

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan laporan dari pelaksanaan rencana kinerja yang tercantum pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan KJRI Dubai tahun 2015 berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan untuk KJRI Dubai untuk tahun 2015. Dengan demikian diharapkan agar materi dan informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat memberikan gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran dari setiap Program dan Kegiatan Operasional yang telah dilakukan KJRI Dubai selama satu tahun.

Dalam lingkup yang lebih kecil, evaluasi kinerja perwakilan yang dilakukan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri merupakan sistem berkesinambungan untuk mendukung upaya melakukan benah diri Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan, yang telah menjadi komitmen pimpinan Kementerian Luar Negeri.

Laporan Kinerja KJRI Dubai memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai sarana bagi KJRI Dubai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Pada tahun 2015, KJRI Dubai telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan Dubai dan emirat-emirat bagian utara di Persatuan Emirat Arab di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Secara umum hubungan dengan wilayah kerja terus mengalami perkembangan dan peningkatan.

Sejalan dengan aturan dan ketentuan terkait, KJRI Dubai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015 sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan perwakilan selama tahun anggaran 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategik KJRI Dubai 2014 – 2016. Dengan asumsi-asumsi tertentu, setiap program pokok yang dijalankan diukur dengan indikator-indikator kinerja yang dijabarkan ke dalam beberapa kriteria kinerja meliputi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses dan produk (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dijabarkan ke dalam matrik pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan matrik pengukuran pencapaian sasaran (PPS).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja KJRI Dubai Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Undang-Undang Dasar 1945 berikut amandemen perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

C. Data Organisasi

Landasan hukum yang mengatur tata kerja, tugas pokok, dan fungsi Perwakilan RI di Luar Negeri antara lain:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian Negara RI;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Luar Negeri No.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan di Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Luar Negeri No.04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, maka KJRI Dubai adalah perwakilan konsuler yang melakukan kegiatan diplomatik dan konsuler di seluruh wilayah kerja untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Indonesia.

Dalam mengemban misinya, KJRI Dubai didukung oleh personil yang terdiri dari pejabat diplomatik dan non-diplomatik sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Tabel berikut menggambarkan data pejabat KJRI Dubai hingga bulan Desember 2015 berdasarkan urutan gelar diplomatik dan kepegawaian.

Data Pejabat KJRI Dubai Tahun 2015

No	Nama	Gelar Diplomatik	Jabatan
1	Arzaf F. Firman	Minister	Konsul Jenderal (Tiba 18 Desember 2014)
2	Temu Alam	Minister Counsellor	Pelaksana Fungsi Ekonomi (Tiba 13 November 2014)
3	Murdi Primbani	Sekretaris I	Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya (Tiba 13 Februari 2015)
4	Rijal Al Huda	Sekretaris I	Pelaksana Fungsi Konsuler 1 (Tiba 27 Mei 2013)
5	Tri Aryadi	Sekretaris II	Pelaksana Fungsi Konsuler 2 (Tiba 1 Mei 2013)
6	M. Arief Priowahono	Sekretaris III	Pelaksana Fungsi Protokol (Tiba 15 Mei 2015)
7	Istabah Abdilah Muhamad	Non Diplomatik	BPKRT (Tiba 13 Juni 2013)

Untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang diemban KJRI Dubai, sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri tersebut di atas, maka organisasi KJRI Dubai disusun ke dalam 3 (tiga) unsur, yakni Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang, sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:
Kepala Perwakilan.
2. Unsur Pelaksana:
 - a. Pelaksana Fungsi Ekonomi/Kepala Kanselerai;
 - b. Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya;
 - c. Pelaksana Fungsi Konsuler/Perlindungan WNI dan BHI;
 - d. Pelaksana Fungsi Konsuler/Dokumen Kekonsuleran;
 - e. Pelaksana Fungsi Protokol.

3. Unsur Penunjang:
BPKRT.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi perwakilan, maka tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur di lingkungan KJRI Dubai dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan: Konsul Jenderal/Kepala Perwakilan RI

- a. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional;
- b. perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
- c. perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
- d. pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi;
- e. peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
- f. pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;
- g. pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

2. Unsur Operasional

i. Pelaksana Fungsi Ekonomi

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas KJRI di bidang ekonomi, termasuk bidang perdagangan, perindustrian, keuangan, penanaman modal, perhubungan dan pariwisata. Bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan/ Konsul Jenderal;
- b. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lain-lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas fungsi ekonomi;
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra struktural yang berkaitan dengan tugas fungsi ekonomi, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- f. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas fungsi ekonomi kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.

ii. Pelaksana Fungsi Konsuler/Perlindungan WNI dan BHI

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas KJRI di bidang perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;

- b. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lain-lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia;
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- e. Mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ekstra struktural yang berkaitan dengan tugas perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- f. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.

iii. Pelaksana Fungsi Konsuler/Dokumen Kekonsuleran

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas KJRI di bidang pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- b. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lain-lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- e. Mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ekstra struktural yang berkaitan dengan tugas pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- f. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.

iii. Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas KJRI di bidang penerangan, sosial, kebudayaan, promosi pariwisata dan pendidikan serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan/ Konsul Jenderal;
- b. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas fungsi Pensosbud;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas fungsi Pensosbud;

- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra struktural yang berkaitan dengan tugas Fungsi Pensosbud, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.
- f. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas penerangan, sosial, dan buaya kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.

iv. Pelaksana Fungsi Protokol

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas KJRI di bidang keprotokolan dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan/ Konsul Jenderal;
- b. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas fungsi keprotokolan;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan tugas fungsi keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Perwakilan/ Konsul Jenderal;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra struktural yang berkaitan dengan tugas Fungsi Protokol, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan/ Konsul Jenderal.
- f. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas keprotokolan kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal.

3. Unsur Penunjang

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan

- a. Membantu Kepala Perwakilan dalam rangka mewujudkan kelancaran organisasi dan manajemen Perwakilan;
- b. Melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- c. Melakukan administrasi umum, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kepegawaian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan administrasinya;
- d. Bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan;
- e. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bendahara kepada Kepala Perwakilan/Konsul Jenderal dan/atau Kepala Kanselera.

E. Aspek Strategik Organisasi

Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan KJRI Dubai untuk tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi Perwakilan pada tahun tersebut, yaitu:

- a. Posisi Dubai sebagai *hub* perdagangan dan transportasi untuk kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa merupakan peluang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke kawasan tersebut.
- b. Posisi Dubai sebagai pusat pameran internasional di kawasan.
- c. Penduduk Dubai dan Emirat Utara lainnya yang multikultural memiliki potensi sangat besar bagi promosi ekonomi dan pariwisata.
- d. Stabilitas politik dan ekonomi di emirat Dubai, emirat-emirat di PEA utara dan PEA pada umumnya mendorong terciptanya alasan yang kuat untuk mempererat hubungan dalam berbagai bidang dengan negara ini.
- e. Semakin banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang berada di Dubai dan wilayah kerja KJRI lainnya menyebabkan tugas pengayoman dan perlindungan WNI semakin penting.
- f. Pemerintah PEA belum memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada pengguna perorangan (khususnya sebagai penata laksana rumah tangga/PLRT). Saat ini belum terdapat hukum PEA atau perjanjian bilateral RI-PEA yang memberikan perlindungan tersebut. Di sisi lain, KJRI Dubai menemukan bahwa sampai saat ini masih banyak TKW yang datang dengan visa PLRT yang dikeluarkan oleh Pemerintah PEA, walaupun Pemerintah RI sudah menutup pengiriman TKI untuk pengguna perorangan ke kawasan Timur Tengah, termasuk PEA.
- g. Sejalan dengan semakin berkembangnya Dubai sebagai *hub* transportasi yang menghubungkan Dubai dengan berbagai kota di dunia, menyebabkan tingkat pelayanan terhadap tamu-tamu dinas KJRI Dubai, baik yang transit maupun kunjungan, semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- h. Semakin berkembangnya bandara internasional Dubai menyebabkan pelayanan dan perlindungan WNI yang diberikan oleh KJRI Dubai tidak hanya diberikan kepada WNI yang berdomisili di wilayah kerja, tetapi juga kepada WNI yang sedang transit di bandara Dubai dengan tujuan akhir ke negara ketiga.
- i. Sangat terbatasnya prasarana yang dimiliki Perwakilan, khususnya ruang penampungan TKI bermasalah serta ruang pertemuan dengan masyarakat, khususnya apabila dibandingkan dengan beban kerja Perwakilan yang terus meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban serta melihat latar belakang dan mencermati keadaan lingkungan domestik yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan regional dan global, maka Visi KJRI Dubai adalah:

“Terwujudnya peningkatan dalam perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, serta dalam diplomasi ekonomi yang akan lebih menumbuhkan rasa kebanggaan dan jati diri Indonesia”

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dinyatakan di atas, KJRI Dubai menetapkan misinya sebagai berikut :

"Meningkatkan peran KJRI Dubai dalam melindungi dan melayani WNI/BHI, serta dalam meningkatkan jumlah nilai perdagangan-investasi-pariwisata, serta dalam terbinaanya kontak hubungan sosial budaya"

3. Tujuan

Implementasi misi tersebut dirumuskan dalam berbagai bentuk tujuan strategik yang hendak dicapai oleh KJRI Dubai, yaitu:

1. Kemampuan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang tumbuh semakin nyata;
2. Kehadiran KJRI Dubai pada kegiatan yang berkaitan dengan Masyarakat Indonesia dan masyarakat setempat yang semakin diakui.

4. Sasaran Strategis

Dengan memperhatikan prioritas tujuan pencapaian visi dan misi, KJRI Dubai telah menetapkan pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Manfaat diplomasi ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat di Indonesia.
- b. Pengenalan Indonesia yang semakin positif di kalangan masyarakat setempat.
- c. Perlindungan dan pelayanan WNI/ BHI yang semakin baik.

5. Indikator Sasaran

Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategik dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri serta praktek diplomasi sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor eksternal (*regional dan global*) dan faktor-faktor internal (*nasional*). Namun demikian, untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategik dari setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh KJRI Dubai setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari beberapa indikator tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Terwujudnya pemberian bantuan dan pelayanan terhadap WNI yang menghadapi masalah hukum dan ketenagakerjaan.

Indikator:

Persentase WNI/BHI yang mendapatkan bantuan dan pelayanan ketika mengalami masalah hukum dan ketenagakerjaan.

2. Terwujudnya perlindungan terhadap WNI/BHI dan masyarakat di wilayah kerja.

Indikator:

- a. Tersedianya *shelter* dengan kelengkapannya yang pantas dan memadai;
- b. Persentase terbantunya WNI yang menghadapi masalah;
- c. Persentase fasilitasi repatriasi WNI terlantar.

3. Meningkatnya pelayanan masyarakat di bidang kekonsuleran.

Indikator:

Persentase peningkatan kualitas pelayanan kekonsuleran di wilayah kerja.

4. Meningkatnya hubungan di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan wilayah kerja.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan volume perdagangan;
- b. Persentase peningkatan nilai investasi;

5. Meningkatnya hubungan kerja sama ekonomi, pembangunan, dan kerjasama teknis dengan wilayah kerja.

Indikator:

Jumlah kegiatan promosi/pendekatan kerjasama ekonomi dan pembangunan.

6. Meningkatnya hubungan di bidang sosial, budaya, pendidikan dan olah raga dengan wilayah kerja.

Indikator:

Jumlah kegiatan promosi di bidang sosial, budaya, pendidikan dan olah raga

7. Terwujudnya pembinaan terhadap WNI/ BHI dan masyarakat di wilayah kerja.

Indikator:

Jumlah WNI dan perwakilan BHI yang hadir/berpartisipasi pada acara-acara yang diselenggarakan KJRI

8. Terciptanya citra positif masyarakat di wilayah kerja mengenai Indonesia.

Indikator:

Persentase liputan positif di media massa wilayah kerja;

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman maupun pegangan guna menjaga kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini

kebijakan yang diterapkan mengacu pada arahan politik luar negeri dan kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam Renstra Kementerian Luar Negeri tahun 2015 – 2019 yang menjadi dasar visi dan misi yang diemban KJRI Dubai, yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pembinaan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
- b. Mengembangkan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- c. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat di wilayah kerja terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera;

7. Program

Dari masing-masing sasaran strategik serta prioritas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri, KJRI Dubai telah menetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program-program tersebut terjabarkan ke dalam Program DIPA dan Program Operasional Perwakilan, sebagai berikut:

- A. Peningkatan Peranan Perwakilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
 - Memprakarsai dan memfasilitasi kunjungan Menteri/pejabat kedua negara dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi.
 - Mengupayakan kunjungan misi dagang kedua pihak.
 - Menindaklanjuti kesepakatan ekonomi yang telah dilakukan.
 - Menyelesaikan kasus/sengketa bisnis yang terjadi.
 - Memfasilitasi *business matchmaking*.
 - Menindaklanjuti *inquiries*.
 - Memfasilitasi minat investasi pengusaha di wilayah kerja dan sebaliknya.
 - Mempromosikan potensi TTI Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak di wilayah kerja.
 - Mengembangkan jejaring kerja.
- B. Menguatnya peran *soft power diplomacy* yang dilakukan oleh Perwakilan RI di wilayah kerja
 - Membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di wilayah kerja.
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan website/portal/media sosial perwakilan untuk mempermudah akses informasi tentang Indonesia dan KJRI Dubai.
 - Membangun networking untuk mendukung penguatan *soft power diplomacy* di wilayah kerja.
 - Menyelenggarakan pertunjukan kesenian/kebudayaan.
 - Memfasilitasi aktivitas diaspora Indonesia.
- C. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah kerja
 - Menyelesaikan permasalahan WNI dan BHI di wilayah kerja.
 - Mengupayakan ketersediaan pengacara untuk penyelesaian kasus hukum *high profile* WNI/BHI.
 - Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah.

- Memberdayakan masyarakat Indonesia di luar negeri bagi penanganan WNI bermasalah.
- Meningkatkan kinerja satgas perlindungan WNI.
- Memperluas jangkauan pelayanan KJRI kepada WNI/BHI yang sulit mengakses pelayanan (*outreach*).
- Meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan kekonsuleran.
- Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran.

D. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

- Merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan kinerja dan anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama tahun 2015 KJRI Dubai telah melaksanakan kegiatan strategik yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategik KJRI Dubai 2014-2016. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja tersebut, maka telah ditetapkan beberapa indikator kuantitatif faktual yang memberi kontribusi bagi penentuan tingkat akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum dalam tahun 2015 kondisi hubungan dengan wilayah kerja menunjukkan perkembangan yang positif dan produktif meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Perkembangan kondisi hubungan bilateral RI – PEA, khususnya Dubai dan wilayah akreditasi KJRI Dubai lainnya selama pelaksanaan program kegiatan KJRI Dubai tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan 6 Emirat yang berada di wilayah kerja KJRI Dubai (Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah dan Fujairah) secara umum dapat dikatakan baik.
2. Dubai sebagai *hub* dalam hubungan perdagangan khususnya dengan negara-negara Afrika, Asia Tengah dan Selatan, serta beberapa negara pecahan Uni Soviet, telah dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai pihak, baik perusahaan negara maupun swasta, untuk mempromosikan dan menjual produk-produk mereka dengan mengambil posisi Dubai sebagai kantor atau pusat distribusi atau tempat melakukan promosi. KJRI telah ikut serta dalam membantu para pengusaha tersebut dalam berpartisipasi pada setiap pameran yang diselenggarakan di Dubai, termasuk membantu pertemuan bisnis dengan para pengusaha UAE. Pengusaha Indonesia telah mengikuti 14 pameran di DWTC.
3. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Emirat Utara ke Indonesia, KJRI telah melakukan berbagai upaya seperti memfasilitasi penyelenggaraan pameran *Wonderful Indonesia* dan *Sales Mission* pariwisata bersama Kemenpar pada tanggal 26 – 31 Mei 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 untuk memasarkan paket-paket kunjungan wisata kepada para pengusaha biro perjalanan UAE. Selain itu, KJRI juga telah memfasilitasi kunjungan tim kesenian Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam untuk menampilkan seni budaya bernuansa Islam Indonesia kepada masyarakat Persatuan Emirat Arab.
4. Dalam upaya menarik investasi langsung dari PEA, KJRI Dubai telah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak seperti Dubal Holding, beberapa perusahaan jasa konstruksi internasional (seperti Emaar, Damac, Trump International, Eagle Hills, Bin Laden, Arabtex), perusahaan pengelola pelabuhan kontainer (DP World), dan perusahaan perbankan syariah (Dubai Islamic Bank) dalam rangka penjualan sukuk Indonesia.

5. Di bidang perlindungan WNI, KJRI telah membuka akses dengan semua pemangku kepentingan di wilayah kerja seperti pihak Imigrasi, Kepolisian, Pengadilan, Rumah Sakit, Penjara, termasuk masyarakat Indonesia dan lembaga sosial. Terdapat sekitar 50.000 jiwa WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Dubai, 80% di antaranya diperkirakan berprofesi sebagai PLRT. Angka ini diperkirakan terus bertambah walaupun sejak 15 Oktober 2013 KJRI Dubai dan KBRI Abu Dhabi telah menghentikan proses legalisasi Perjanjian Kerja (PK) dan *job order* (JO) untuk penempatan TKI-PLRT dan terhitung 26 Mei 2015 Menaker RI telah secara resmi menetapkan penutupan penempatan TKI untuk pengguna perorangan ke wilayah Timur Tengah. Dapat ditambahkan bahwa pada tahun 2015 KJRI Dubai telah mensosialisasikan jalur *hotline* perlindungan yang mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Indonesia.
6. KJRI Dubai secara berkelanjutan telah meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia, PEA dan asing lainnya yang datang ke KJRI untuk meminta pelayanan konsuler dan keimigrasian. Dalam hal ini KJRI Dubai telah memperbaharui sistem kerja dan meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan publik.
7. KJRI Dubai telah melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka pembinaan masyarakat, khususnya dengan melakukan pendekatan langsung kepada berbagai kelompok masyarakat, selain dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya di kantor KJRI Dubai. Beberapa kegiatan masyarakat tersebut antara lain: penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Dubai setiap minggu, pengajian bulanan bekerja sama dengan *Indonesian Moslem Association* (IMA) Dubai, peringatan hari-hari besar nasional dan agama.
8. Sebagai *hub* transportasi dan salah satu destinasi turisme utama dunia, Bandara Dubai International (DXB) menjadi tempat transit dan kunjungan favorit bagi pejabat Indonesia dan masyarakat umum. KJRI Dubai telah memberikan pelayanan keprotokolan dan bantuan keimigrasian kepada WNI (termasuk yang terlantar karena berbagai alasan) yang melakukan transit atau kunjungan ke Dubai. Pelayanan keprotokolan KJRI Dubai dibatasi oleh akses masuk yang hanya diberikan kepada 2 (dua) *home staff*.
9. Pengelolaan administrasi KJRI Dubai dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan rencana kinerja KJRI Dubai Tahun Anggaran 2015. Realisasi anggaran Tahun 2015 mencapai 97,01%. Di bidang pengelolaan BMN, KJRI Dubai telah melakukan penghapusan dan pengadaan kendaraan dinas. Pada tahun 2015, KJRI Dubai telah menerima 2 (dua) *home staff* baru dan seorang Pegawai Setempat mengundurkan diri.

A.1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Selama tahun 2015 KJRI telah menetapkan sejumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan-kegiatan andalan yang dinilai memberikan gambaran keberhasilan KJRI Dubai di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Kegiatan ekonomi

1. Memfasilitasi kunjungan Menteri/pejabat tinggi yaitu:
 - a. Kunjungan Menteri Pariwisata dalam rangka Arabian Travel Market dan melakukan pertemuan dengan beberapa investor untuk memasarkan daerah ekonomi khusus Tanjung Lesung di Propinsi Banten dan Mandalika di NTB.
 - b. Kunjungan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Plt. Gubernur Banten, Rano Karno, delegasi dari Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala BKPM Jawa Timur, Lili Soleh Wartadipradja, dan delegasi dari BKPM Jawa Barat pada *Annual Investment Meeting 2015* yang memasarkan proyek-proyek di ke-4 propinsi tersebut kepada para investor UAE.
 - c. Delegasi Konstruksi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sdr. Yusid Toyib dalam rangka berpartisipasi pada Pameran *the BIG 5 International Building and Construction Show Dubai 2015* pada tgl 23 – 26 Nopember 2015 dan melakukan serangkaian pertemuan dengan beberapa perusahaan jasa konstruksi UAE. Hasilnya beberapa investor UAE tertarik untuk berpartisipasi pada beberapa proyek pembangunan di Indonesia baik sebagai kontraktor maupun sebagai investor, dan akan segera mengirimkan timnya ke Indonesia untuk membicarakan secara teknis bentuk kerjasama yang akan dilakukan.
 - d. Kunjungan Menteri Keuangan dalam rangka roadshow penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk kepada para pengusaha bank dari negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC)*.
2. Membantu partisipasi para pengusaha Indonesia pada beberapa pameran di Dubai yaitu:
 - a. Partisipasi para pengusaha Indonesia pada pameran *Arab Health* tgl. 26-29 Januari 2015. Hasilnya, nilai transaksi sebesar US \$ 3,9 juta.
 - b. Partisipasi pengusaha Indonesia pada *Gulfood 2015* tgl 8 – 12 Februari 2015. Hasilnya, diperkirakan lebih dari US \$ 4 juta.
 - c. Partisipasi pengusaha Indonesia pada Pameran *Index 2015*. Hasilnya, nilai transaksi sebesar US \$ 2 juta.
 - d. Partisipasi pengusaha Indonesia pada Pameran *Beauty World* tgl. 27 – 29 Mei 2015. Hasilnya, nilai transaksi sekitar US \$ 3 juta.
 - e. Partisipasi pengusaha Indonesia pada Pameran *Auto Mechanika* tgl. 3-5 Juni 2015. Hasilnya, nilai transaksi sekitar US \$ 2.8 juta.
 - f. Partisipasi pengusaha Indonesia pada *Dubai International Jewellery Week* tgl 9-12 Desember 2015 dengan hasil transaksi US \$ 75 ribu.
 - g. Partisipasi pengusaha Indonesia pada *International Autumn Trade Fair* tgl 17-19 Desember 2015 dengan hasil transaksi US \$ 500 ribu.
3. Mengupayakan kunjungan misi dagang ke Indonesia yaitu:
 - a. Kunjungan delegasi Dubai Islamic Economic Mission yang diikuti oleh 12 (dua belas) pengusaha bidang syariah pada tanggal 1 – 4 Februari 2015. Selama di Jakarta mereka mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan BKPM, selain melakukan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia pada seminar sehari di Grand Hyatt Hotel.

- b. Kunjungan pengusaha Dubai untuk hadir pada Indonesia *Middle East Update* (IMEU) di Banda Aceh. Hasilnya adalah bahwa Mr. Muhammad Farajallah, Presiden Direktur Akbat *Commercial Broker* LLC, akan melakukan kerjasama dengan PT. Incona Mega untuk membangun kompleks perumahan di Banda Aceh.
 - c. Melakukan roadshow sosialisasi Trade Expo Indonesia (TEI) 2015 ke Fujairah, Ras Al Khaimah dan Umm Al Quwain, serta mendampingi 26 (dua puluh enam) pengusaha dari Emirat Utara. Hasilnya adalah 8 (delapan) orang pengusaha telah melakukan transaksi dengan nilai sebesar US \$ 20.66 juta (dua puluh koma enam puluh enam juta US Dollar). Selain itu, Fakih Group of Companies dari Dubai mendapatkan dua kali berturut-turut penghargaan Primaduta Award dari Pemerintah Indonesia untuk kategori pembinaan UKM Indonesia.
4. Melakukan pertemuan dengan pengusaha Indonesia dan pengusaha/Kadin di wilayah kerja guna mempromosikan potensi ekonomi yaitu dengan KADIN Dubai dan Kadin-kadin di wilayah kerja (Fujairah, Ras Al Khaimah dan Umm Al Quwain), Jabal Ali *Free Zone* di Dubai, Ras Al Khaimah *Free Zone*, dan Dubai Holding.
 5. Berkoordinasi dengan ITPC dan IIPC telah menanggapi 19 *inquiries* baik dari pengusaha Indonesia maupun pengusaha setempat. Beberapa produk yang dicari antara lain: *garment*, rempah-rempah, ikan tuna dan sardine kalengan, *furniture* serta makanan dan minuman olahan.
 6. Membantu penyelesaian masalah hukum, yaitu selisih merk dagang dan penipuan (kasus minyak goreng di Afganistan, JCo Donut, kasus penipuan melalui email yang di *hacked*).
 7. Membantu Kemenpar menyelenggarakan *Sales Mission* pariwisata pada tanggal 23 November 2015 untuk memasarkan paket-paket kunjungan wisata kepada para pengusaha biro perjalanan UAE. 4 (empat) perusahaan biro perjalanan Indonesia ikut hadir pada acara *Sales Mission* ini dan bertemu 15 (lima belas) perusahaan PEA guna menjajaki peluang kerjasama.

Kegiatan perlindungan WNI/BHI

8. Menyediakan *shelter* bagi 60/70 orang WNI bermasalah setiap harinya, termasuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tahun 2015 total WNI bermasalah yang sempat menghuni *shelter* berjumlah 745 orang (termasuk 3 orang TKI laki-laki).
9. Memberikan pelatihan Bahasa Inggris dan program membaca Paket A bagi para penghuni *shelter*.
10. Membantu penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan keimigrasian para penghuni *shelter*, dengan hasil: 240 orang dipulangkan ke Indonesia melalui KJRI, 296 orang dipulangkan melalui Imigrasi Emirat Utara, 44 orang bekerja kembali setelah masalah mereka terselesaikan, dan 95 orang diserahkan ke KBRI Abu Dhabi untuk penanganan selanjutnya. Hingga tahun 2015 berakhir, tercatat masih terdapat 58 TKI yang masih menghuni *shelter* KJRI Dubai dan diproses penyelesaian masalahnya.

11. Membantu WNI mendapatkan hak-hak keuangan mereka: AED 229.140 (sekitar Rp 824.904.000) gaji, AED 22.200 (sekitar Rp79.920.000) kompensasi atas pemukulan, AED 100.000 (Rp 360.000.000) diyat.
12. Membantu penyelesaian masalah keimigrasian dan pemulangan 1.164 orang WNI overstayer/TKI undocumented, termasuk untuk penerbitan SPLP, pendampingan di Imigrasi, dan membantu penyediaan tiket (khususnya melalui program percepatan pemulangan WNIO/TKIU 2015 yang merupakan program nasional di bawah koordinasi Dit. PWNI BHI). KJRI Dubai juga memberikan bantuan yang menyangkut biaya penterjemah, denda ijin tinggal yang dilewati, biaya pembatalan visa, biaya sidang, biaya pengetikan untuk sebagian besar WNI terlantar di semua wilayah kerja.
13. Memfasilitasi pemakaman atau pemulangan jenazah 20 WNI yang meninggal.
14. Membantu penanganan maupun pemulangan 11 WNI yang sakit (sebagian besar adalah WNI yang sakit ketika transit di Bandara Dubai)
15. Memberikan bantuan bagi 18 WNI yang bermasalah dengan hukum, baik melalui bantuan penerjemahan, pendampingan, hingga bantuan jasa pengacara (4 pengacara untuk 4 kasus).
16. Menyediakan dan menyebarluaskan nomor telepon hotline KJRI Dubai untuk perlindungan WNI/BHI.

Kegiatan pelayanan konsuler dan keimigrasian

17. Penerbitan 2.114 paspor RI 24 halaman dan 482 paspor RI 48 halaman bagi WNI yang tinggal di Emirat Utara, 1.165 SPLP, 3.631 surat keterangan cuti, 456 surat keterangan lainnya, melayani 5.257 lapor diri, melegalisasi 354 dokumen, perpanjangan dan penyijilan 82 buku pelaut, perpanjangan masa berlaku 694 Paspor.
18. Menerbitkan 3.276 visa untuk 104 kewarganegaraan.
19. Memverifikasi dan melegalisasi 12 *job order* (JO) dan 62 perjanjian kerja (PK) TKI formal.
20. Pengiriman 140 kawat ke pusat mengenai permintaan pengeluaran izin visa bagi WNA. Penerimaan 168 kawat dari Ditjen Imigrasi mengenai otorisasi pengeluaran visa bagi WNA.
21. Memasang pengumuman mengenai persyaratan permohonan visa, baik melalui internet, *standing banner* dan poster.
22. Melakukan kunjungan ke kantong WNI di Fujairah (2 kali) dan Ras Al Khaimah (sekali) untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan konsuler.

Kegiatan Penerangan, Sosial dan Budaya

23. Membuka Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Dubai pada 15 Januari 2015 dan dilaksanakan setiap minggu. Siswa TPA Dubai yang aktif hadir sekitar 40 orang anak WNI dengan usia antara 4 – 14 tahun.
24. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat melalui pengajian bulanan dan acara buka puasa bersama pada bulan Ramadhan sepanjang tahun 2015 bekerja sama dengan *Indonesian Muslim Association* (IMA). Kehadiran masyarakat semakin hari semakin meningkat hingga mencapai 300 orang pada tiap pertemuan.
25. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan, yaitu: Paskah, Shalat Idul Fitri 1436 H dan Shalat Idul Adha 1436 H dimana masing-masing Shalat led dihadiri sekitar 1500 WNI.
26. Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Nasional yaitu Upacara Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari KORPRI Ke-44 serta Hari Ibu dan Ulang Tahun DWP Ke-16. Setiap upacara juga dihadiri oleh masyarakat Indonesia di wilayah Emirat Utara.
27. Menyelenggarakan acara kesenian dan hiburan masyarakat melalui penyelenggaraan "*Indonesian Summer Bazaar*" pada bulan Juni 2015 dan "Pesta Rakyat dan Bazaar 2015" pada bulan Oktober 2015, yang masing-masing dihadiri oleh lebih dari 2000 (dua ribu) pengunjung.
28. Menyelenggarakan pertandingan olah raga dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Ke-70 RI tahun 2015 pada bulan September – Oktober 2015. Terdapat 5 (lima) cabang olah raga yang dipertandingkan yaitu futsal, bowling, tenis meja, tenis lapangan dan bulutangkis. Masyarakat Indonesia dari seluruh PEA ikut berpartisipasi sebagai peserta maupun penonton.
29. Membantu masyarakat Indonesia maupun Kemenpar RI dalam mempromosikan seni budaya maupun kuliner Indonesia di Dubai yaitu pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan di Horizon International School, Hotel The Address Dubai Mall, Aga Khan Early Learning Center, dan The Oberoi Hotel Dubai.
30. Melaksanakan promosi seni budaya maupun kuliner Indonesia pada acara Resepsi Diplomatik Memperingati 70 Tahun Kemerdekaan RI di The Address Downtown.
31. Menyampaikan politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada *The 10th UN Simulation Conference 2015* di GEMS Our Own Indian School Dubai.
32. Membuat suplemen mengenai Indonesia dalam rangka 70 tahun kemerdekaan RI di harian *The Khaleej Times* tanggal 17 Agustus 2015, dan memfasilitasi 6 (enam) wakil masyarakat Indonesia di Emirat Utara mengucapkan salam kemerdekaan ke-44 PEA di Harian *The Gulf Today* pada 2 Desember 2015.

33. Memfasilitasi penyelenggaraan 2 (dua) kali ujian tertulis Universitas Terbuka bagi masyarakat di PEA pada 22-23 Mei 2015 dan 13-14 November 2015.
34. Memfasilitasi pertemuan antara Rektor Universitas Darussalam Gontor dengan College of Islamic and Arabic Studies, Al Karama, Dubai, 30 April 2015 yang menghasilkan kesepakatan kerja sama pendidikan. KJRI Dubai membantu memfasilitasi pengiriman buku-buku Islam sumbangan dari College of Islamic and Arabic Studies.
35. Memfasilitasi 2 (dua) mahasiswa Universitas Indonesia pada ajang Hult Prize: Global Case Challenge di Hult International Business School, Dubai, 13 - 14 Maret 2015.
36. Memberikan dukungan kepada atlet-atlet Indonesia yang mengikuti pertandingan olahraga di Dubai yaitu kepada 8 (delapan) atlet bulutangkis Indonesia yang bertanding di Kejuaraan Dubai Badminton Super Series Final 9 - 13 Desember 2015 di Sheikh Hamdan Sports Hall dan kepada tim futsal Indonesia pada ASEAN Soccer 5-A-Side, 4 Desember 2015 di Al Ahli Stadium Dubai.
37. Memberikan dukungan bagi wakil-wakil Indonesia pada lomba menghafal Al Qur'an di Dubai yaitu kepada Sdr. Abdurrahim Syamsuri Jono (Juara III) pada ajang International Holy Qur'an Award ke-19 di Dubai, dan pada lomba lagu islami atas nama Wahidul Kholis Assaamy pada acara Munshid Sharjah, 4 dan 11 Desember 2015 di Al Majaz Amphi Theatre, Sharjah.
38. Memfasilitasi pertunjukan seni tari Nanggroe Aceh Darussalam dalam acara pentas seni di Dubai Global Village, 9 - 10 Desember 2015, dan pentas di KJRI Dubai untuk masyarakat Indonesia pada 11 Desember 2015.
39. Memfasilitasi dialog masyarakat Indonesia dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yaitu Kemenpar RI, Wantimpres RI, anggota DPD RI, dan anggota delegasi MPR – RI.
40. Pembinaan masyarakat Indonesia dalam bentuk kegiatan temu masyarakat di Fujairah dan Ras Al Khaimah (Maret 2015).

Kegiatan Keprotokolan

41. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan bagi 2.400 (dua ribu empat ratus) pejabat dan pendamping yang transit di dalam dan keluar bandara maupun berkunjung ke Dubai untuk tujuan kedinasan maupun pribadi yang terbagi dalam 348 kegiatan selama tahun 2015.

Kegiatan Administrasi

42. KJRI Dubai mendapatkan anggaran pertama kali sebesar Rp22.196.414.000,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan setelah beberapa kali revisi anggaran KJRI Dubai menjadi Rp28.959.449.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran pada akhir

tahun sebesar Rp28.092.230.263,00 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 97,01%. Perincian pengelolaan anggaran disampaikan pada bagian pembahasan anggaran.

43. Pengelolaan BMN sepanjang tahun 2015 ditandai dengan beberapa kegiatan khususnya penghapusan 4 (empat) unit kendaraan dinas masing-masing 2 (dua) unit Mercedes Benz, 1 (satu) unit Toyota Camry, dan 1 (satu) unit Toyota Previa; dan pembelian 3 (tiga) unit kendaraan dinas masing-masing 2 (dua) unit Toyota Camry dan 1 (satu) unit Honda Odyssey.
44. Sepanjang tahun 2015 telah datang 2 (dua) home staff masing-masing Sdr. Murdi Primbani beserta keluarga dan Sdr. Muhammad Arief Priowahono beserta keluarga. Akhir tahun 2015 seorang pegawai setempat telah mengundurkan diri a.n. Sdr. Putera Ajie Kuncoro. KJRI Dubai telah mengirimkan kawat kepada Biro Kepegawaian untuk meminta tambahan pegawai setempat guna memenuhi formasi pegawai setempat KJRI Dubai sejumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) diantaranya direkrut oleh pusat.
45. Mengingat BPKRT KJRI Dubai melaksanakan pula fungsi Petugas Komunikasi, dapat disampaikan bahwa jumlah komunikasi sepanjang tahun 2015 adalah berita rahasia keluar sejumlah 40 berita, berita biasa keluar sejumlah 529 berita, berita rahasia masuk sejumlah 533 berita, dan berita biasa masuk sejumlah 1.592 berita. KJRI Dubai juga menerima 530 berita melalui surat elektronik dan faksimili.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai DIPA dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-011.01.1.651948/2015 tanggal 14 November 2014 KJRI Dubai menerima sebesar Rp22.196.414.000,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah), yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp19.322.936.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional, dan Belanja Modal, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.873.478.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk Belanja Barang Operasional (Belanja Pemeliharaan), Belanja Barang Non Operasional (hanya untuk *output* WNI/BHI yang mendapatkan pelayanan/perlindungan), dan Belanja Modal. KJRI Dubai belum mendapatkan anggaran untuk *output* selain perlindungan WNI/BHI sehingga pada awal tahun belum dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi serta pembinaan masyarakat.

Pada tanggal 18 Maret 2015, KJRI Dubai menerima revisi ke-1 DIPA sebesar Rp5.105.033.000,00 (lima miliar seratus lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp27.301.447.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran Belanja Tambahan tersebut semua untuk Belanja Barang Non Operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fungsi-fungsi yang ada di KJRI Dubai. Namun masih terdapat sumber dana PNBP terutama untuk *output* Perlindungan WNI/BHI.

Pada tanggal 30 Juni 2015, KJRI Dubai menerima revisi ke-2 DIPA, namun revisi ini bukan penambahan anggaran melainkan pengurangan anggaran sebesar

Rp971.234.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pengurangan tersebut berasal dari Belanja Pegawai (TPLN Home Staff) dan Belanja Barang Operasional (Belanja Keperluan Perkantoran) dikarenakan tidak lolos verifikasi dari BPKP.

Pada tanggal 12 Oktober 2015, KJRI Dubai menerima revisi ke-3 DIPA sebesar Rp755.887.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan ABT Belanja Barang Non Operasional terutama untuk *output* Perlindungan WNI/BHI dan Promosi/Kerja sama Internasional.

Pada tanggal 24 November 2015, KJRI Dubai menerima revisi ke-4 DIPA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan tambahan untuk Belanja Pegawai (TPLN Home Staff).

Pada tanggal 18 Desember 2015, KJRI Dubai menerima revisi ke-5 DIPA sebesar Rp1.673.349.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). ABT tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai (TPLN Home Staff) dan Belanja Langganan Daya Jasa (Belanja Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air, dan Belanja Sewa) sehingga total anggaran KJRI Dubai tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp28.959.449.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Selain itu selama tahun 2015 KJRI Dubai melakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA yang masih dalam satu *output* yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Revisi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 49/SK/DUBAI/X/15 tanggal 18 Oktober 2015, 52/SK/DUBAI/XI/15 tanggal 30 November 2015, dan 54/SK/DUBAI/XII/15 tanggal 20 Desember 2015. Revisi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Perwakilan dikarenakan terdapat beberapa mata belanja anggaran yang berlebih sehingga dapat ditambahkan pada mata belanja anggaran yang mengalami kekurangan tetapi masih dalam satu kegiatan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi sisa anggaran yang terlalu besar di akhir tahun.

Realisasi anggaran KJRI Dubai tahun anggaran 2015 sebesar Rp28.092.230.263,00 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dengan persentase sebesar 97,01% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai = Rp11.144.466.505,00 (95.57%)
- Belanja Barang Operasional = Rp 9.096.852.116,00 (98.22%)
- Belanja Barang Non Operasional = Rp 5.036.588.884,00 (90.86%)
- Belanja Modal = Rp 1.137.902.203,00 (99.85%)

Sedangkan rincian realisasi berdasarkan sumber anggaran adalah sebagai berikut:

- Rupiah Murni = Rp25.681.559.205,00 (98.45%)
- PNPB = Rp 2.410.671.058,00 (83.89%)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Tahun Anggaran 2015, KJRI Dubai secara umum telah melaksanakan hampir seluruh rencana kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebagai implementasi kerja Rencana Strategik periode 2014-2016. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diplomasi telah mengoptimalkan seluruh potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KJRI Dubai dengan berpegang pada asas tertib dalam semangat benah diri Kementerian Luar Negeri, yakni tertib waktu, tertib administrasi dan tertib fisik dan penekanan pada pembentukan kerja *team work* dari seluruh unsur.

Dari segi realisasi anggaran, pada umumnya pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 telah dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dan tetap berorientasi pada misi dan target yang hendak dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh KJRI Dubai diharapkan telah memberikan kontribusi bagi hubungan bilateral Indonesia dengan PEA secara keseluruhan.

B. Kendala Utama

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan selama tahun 2015 kendala utama yang berarti yang berpotensi dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah menyangkut sumber daya manusia dan anggaran, dimana personil tenaga pendukung yang dimiliki KJRI Dubai tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang terus meningkat setiap tahunnya serta jumlah anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sementara di sisi eksternal, karakteristik masyarakat Arab setempat masih menjadi kendala yang perlu disiasati agar program kegiatan dan pekerjaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendala lainnya adalah kesulitan mengoptimalkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi/pihak di Indonesia.

C. Pemecahan Masalah

Dalam mengatasi hal-hal yang menjadi kendala utama pelaksanaan kegiatan, KJRI telah menempuh upaya-upaya yang juga akan diterapkan pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan mekanisme koordinasi antara KJRI Dubai dan Pusat, termasuk melalui jalur dan jejaring pribadi. Rapat koordinasi dengan KBRI Abu Dhabi dan terbukanya hubungan pribadi yang erat diantara staf telah membantu penyelesaian banyak permasalahan.

2. Strategi memberdayakan personil yang terbatas dalam banyak hal dalam persiapan kegiatan dan penentuan target agar lebih jelas, terukur dan memenuhi aspek efisiensi dan efektifitas, baik waktu maupun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai bentuk, termasuk penerapan *reward and punishment system*.
3. Mengintensifkan pendekatan dan koordinasi dengan pemerintah wilayah kerja, pengusaha, tokoh masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia dalam rangka memperoleh informasi yang lebih luas dan akurat.

Dubai, Januari 2016

Arzaf F. Firman
Konsul Jenderal